



2020 APIP

LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN

- Laporan Realisasi Anggaran
- Laporan Operasional
- Laporan Perubahan Ekuitas
- Neraca
- Catatan atas Laporan Keuangan

**INSPEKTORAT
KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2020**



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU INSPEKTORAT

Jl. Ir. Soekarno No. Pasangkayu, (Pasangkayu – Sulawesi Barat) KodePos 91571

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk tahun Anggaran 2020 sebagaimana terlampir, adalah tanggungjawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian Intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak serta sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (SAP).

Demikian pernyataan ini, kami buat dan untuk dipergunakan seperlunya.

Pasangkayu, 02 Februari 2021

Pengguna Anggaran,

RAHMAT, S.Sos., M.Si

Pangkat : Pembina Tk. I

NIP. 19750429 200312 1 006



PEMERINTAH KABUPATEN PASANGKAYU INSPEKTORAT

Jl.Ir. Soekarno No. Pasangkayu, (Pasangkayu – Sulawesi Barat) KodePos 91571

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2020, pertanggal 31 Desember 2020 telah disusun.

Laporan Keuangan ini disusun sebagai implementasi dari amanah pasal 28 ayat (1) Undang-Undang nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Peraturan-peraturan Perundangan lainnya yang menyangkut tentang tanggung jawab Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), serta peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 dan Perubahannya Nomor 59 Tahun 2009 tentang pedoman pengelolaan Keuangan Daerah.

Peyampaian laporan Keuangan ini disampaikan dengan menyajikan Laporan Realisasi Anggaran dimana menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2020 dengan realisasinya yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja, laporan Neraca yang menggambarkan posisi Keuangan tahun 2020 berkenaan dengan aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan, dan catatan atas Laporan dasar Keuangan yang menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antar lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi yang di perlukan.

Dalam penyajian laporan Realisasi Anggaran, pendapatan dan belanja di akui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas.

Penyajian neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memephrhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dari Kas Daerah.

Demikian, Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu per tanggal 31 Desember 2020 ini disusun agar dapat memberikan penjelasan yang memadai serta dapat lebih meningkatkan kinerja dan akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan di Kabupaten Pasangkayu pada umumnya.

Pasangkayu, 02 Februari 2021
Inspektur,

RAHMAT, S.Sos., M.Si
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. 19750429 200312 1 006

**CATATAN atas LAPORAN KEUANGAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD)
INSPEKTORAT KABUPATEN PASANGKAYU
TAHUN ANGGARAN 2020**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Tahun 2020 disusun secara lengkap dengan maksud sebagai salah satu wujud dari transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Sedangkan tujuan dari Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Akhir Tahun adalah untuk menyajikan informasi keuangan yang di dalamnya terdapat penjelasan mengenai pos-pos Laporan Keuangan selama tahun 2020 dalam rangka pengungkapan yang memadai.

a. Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran tahun 2020 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan dan belanja.

Realisasi belanja, khususnya pada belanja langsung untuk program kegiatan Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 3.397.387.050,00** atau mencapai **99.64%** dari anggaran pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu.

b. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

c. Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir.

d. Neraca

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Tahun 2020 mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal pelaporan.

Jumlah Aset per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp.886.720.984,00**, yang terdiri dari aset lancar sebesar Rp.325.000,00, Investasi jangka panjang sebesar Rp. 0,00, aset tetap sebesar Rp.879.020.984,00, dana cadangan Rp. 0,00 dan aset lainnya sebesar Rp. 0,00.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 0,00**. Dan jumlah Ekuitas per 31 Desember 2020 adalah sebesar **Rp. 886.720.984,00**.

e. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain mengenai dasar penyusunan laporan keuangan, kebijakan akuntansi, kejadian penting lainnya, dan informasi tambahan yang diperlukan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Akuntansi Pemerintah berbasis AkruaI pada pemerintah Daerah
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Utara Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 5);
14. Peraturan Bupati Kabupaten Mamuju Utara Nomor 39 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Mamuju Utara;
15. Peraturan Bupati Mamuju Utara Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pasangkayu Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020;
17. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020.
18. Peraturan Bupati Pasangkayu Nomor 23 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020.

1.3. Unsur Laporan Keuangan

Laporan Keuangan pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Inspektorat Kabupaten Pasangkayu periode 1 Januari 2020 s/d 31 Desember 2020, yang terdiri atas:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Operasional;
- c. Laporan Perubahan Ekuitas;
- d. Neraca; dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai, antara lain:

- a. Menyajikan informasi tentang pencapaian target yang ditetapkan dalam peraturan daerah tentang APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan;
- c. Menyajikan informasi tentang dasar laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas; dan
- a. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu disajikan dengan urutan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Unsur Laporan Keuangan
- 1.4. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

BAB II. EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Kebijakan Keuangan
- 2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala

BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI

- 4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintah

BAB V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

- 5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja
- 5.2. Penjelasan Laporan Operasional
- 5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

BAB VI. PENUTUP

BAB II

EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PROGRAM PENCAPAIAN TARGET KINERJA

2.1. Ekonomi Makro

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sangat dipengaruhi oleh besaran-besaran makro ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi, nilai tukar rupiah, tingkat inflasi yang ada, dan adanya kondisi darurat Pandemi COVID-19. Disamping itu Alokasi Jumlah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah turut berpengaruh dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) khususnya pada adanya kondisi darurat COVID-19.

2.2. Kebijakan Keuangan

Kebijakan keuangan pemerintah daerah, dalam hal ini di SKPD Inspektorat Kabupaten Pasangkayu menitik beratkan pada Bidang Peningkatan Sistem Pengawasan Internal, memberikan keyakinan terbatas berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI), Pengawasan terhadap anggaran COVID-19, serta Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan. Pemerintah daerah melakukan pengeluaran untuk pemenuhan kebutuhan bagi Pelayanan Administrasi Perkantoran dan Umum serta Pengelolaan, Pengadaan aset Daerah serta Pengeluaran lainnya yang mengarah pada efisiensi dan efektifitas.

2.3. Program Pencapaian Target Kinerja

Untuk pencapaian target kinerja tahun anggaran 2020, Inspektorat Kabupaten Pasangkayu mempunyai 5 program dalam urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang dimana dari masing-masing program tersebut terdapat beberapa kegiatan yang mengikutinya.

Program-program APBD pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu yang akan dilaksanakan selama tahun 2020 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- d. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan; dan
- e. Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Inspektorat Kabupaten Pasangkayu memperoleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 secara keseluruhan sebesar **Rp. 6.065.270.791,00** yang terdiri dari:

No	Uraian	Anggaran (Rp)
1	Belanja Operasi	5.880.950.791,00
2	Belanja Modal	184.320.000,00
JUMLAH		6.065.270.791,00

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020 dapat dirinci sebagai berikut :

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendapatan			
	- Pendapatan Asli Daerah	0,00	0,00	0
2	Belanja			
	- Belanja Operasi	5.880.950.791,00	5.860.930.745,00	99,66
	- Belanja Modal	184.320.000,00	183.541.000,00	99,58
JUMLAH		6.065.270.791,00	6.044.471.745,00	99,66

Realisasi pencapaian target kinerja keuangan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- Belanja Daerah

Realisasi belanja untuk program dan kegiatan sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar **Rp.6.044.471.745,00** atau mencapai **99,66%**. Dengan demikian jumlah anggaran belanja yang belum terserap sebesar **Rp. 20.799.046,00** atau **0,34%** yang dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

No.	Uraian	Jumlah Anggaran	Realisasi Anggaran	Sisa Pagu Anggaran	%
	BELANJA	6,065,270,791	6,044,471,745	20,799,046	99.66%
	BELANJA TIDAK LANGSUNG	2,655,634,970	2,647,084,695	8,550,275	99.68%
	Belanja Pegawai	2,655,634,970	2,647,084,695	8,550,275	99.68%
	Gaji dan Tunjangan	2,297,254,970	2,297,254,851	119	100.00%
	Gaji Pokok PNS/Uang Representasi	1,763,578,813	1,763,578,813	-	100.00%
	Tunjangan Keluarga	167,731,744	167,731,744	-	100.00%
	Tunjangan Jabatan	119,565,000	119,565,000	-	100.00%
	Tunjangan Fungsional	102,100,000	102,100,000	-	100.00%
	Tunjangan Fungsional Umum	45,920,000	45,920,000	-	100.00%
	Tunjangan Beras	97,260,060	97,260,060	-	100.00%

	Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus	1,073,859	1,073,859	-	100.00%
	Pembulatan Gaji	25,494	25,375	119	99.53%
	Tambahan Penghasilan PNS	358,380,000	349,829,844	8,550,156	97.61%
	Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja	358,380,000	349,829,844	8,550,156	97.61%
	BELANJA LANGSUNG	3,409,635,821	3,397,387,050	12,248,771	99.64%
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	629,106,186	627,262,940	1,843,246	99.71%
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6,137,500	6,137,500	-	100.00%
2	Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72,162,600	71,894,554	268,046	99.63%
3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah	9,600,000	9,600,000	-	100.00%
4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional	2,750,000	1,533,600	1,216,400	55.77%
5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	69,340,000	69,330,000	10,000	99.99%
6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	25,874,700	25,874,000	700	100.00%
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor	9,940,000	9,940,000	-	100.00%
8	Penyediaan Barang Cetak & Penggandaan	10,604,000	10,600,000	4,000	99.96%
9	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	4,000,000	4,000,000	-	100.00%
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	10,080,000	10,040,000	40,000	99.60%
11	Penyediaan Makanan dan Minuman	4,980,000	4,975,000	5,000	99.90%
12	Rapat Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	368,633,986	368,372,486	261,500	99.93%
13	Rapat rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	23,003,400	22,965,800	37,600	99.84%
14	Penyediaan Jasa Kantor	12,000,000	12,000,000	-	100.00%
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	218,270,000	217,466,000	804,000	99.63%
1	Pengadaan peralatan gedung kantor	184,320,000	183,541,000	779,000	99.58%
2	Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan	20,000,000	20,000,000	-	100.00%
3	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	6,750,000	6,725,000	25,000	99.63%
4	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	7,200,000	7,200,000	-	100.00%
III	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	287,124,600	287,124,600	-	100.00%
1	Bimbingan Teknis Peningkatan Kapabilitas Apip (IACM)	287,124,600	287,124,600	-	100.00%
IV	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Keuangan	10,748,750	10,741,150	7,600	99.93%
1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1,916,250	1,916,250	-	100.00%
2	Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran	1,916,250	1,916,250	-	100.00%

3	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	1,916,250	1,916,250	-	100.00%
4	Penyusunan Renja, RKA, RKAP, DPA, dan DPPA SKPD	5,000,000	4,992,400	7,600	99.85%
V	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	2,264,386,285	2,254,792,360	9,593,925	99.58%
1	Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	624,799,310	624,796,410	2,900	100.00%
2	Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	134,343,750	133,489,450	854,300	99.36%
3	Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	49,294,100	49,276,400	17,700	99.96%
4	Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif	254,239,425	251,632,900	2,606,525	98.97%
5	Kerjasama Sistem Pengawasan Internal Pelaksanaan Kegiatan	231,000,000	230,438,400	561,600	99.76%
6	Pemeriksaan Serentak Stock Opname	154,230,150	154,230,150	-	100.00%
7	Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu	83,308,100	83,060,200	247,900	99.70%
8	Pemeriksaan Desa	393,864,150	393,863,850	300	100.00%
9	Pemeriksaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)	150,137,400	148,504,400	1,633,000	98.91%
10	Pemeriksaan Dana Kesehatan	30,177,700	28,224,300	1,953,400	93.53%
11	Saber Pungli	62,913,050	61,447,550	1,465,500	97.67%
12	Aksi Pencegahan Korupsi dan KORSUPGAH	96,079,150	95,828,350	250,800	99.74%
JUMLAH		6,065,270,791	6,044,471,745	20,799,046	99.66%

Untuk realisasi keseluruhan belanja, baik Belanja Langsung maupun Belanja Tidak Langsung adalah sebesar **6.044.471.745.00** atau mencapai **99,66%**. Pada realisasi total belanja ini, nilai realisasi yang didapat sangat baik dikarenakan penyerapan anggaran yang hampir sesuai dengan apa yang telah dianggarkan sebelumnya sehingga efektifitas anggaran pada tahun 2020 pun tercapai. Anggaran yang tidak terpakai sebagian besar merupakan bentuk dari efisiensi anggaran tahun 2020.

3.2. Hambatan dan Kendala

Secara umum dalam pencapaian target realisasi belanja yang tidak optimal dalam setiap pelaksanaan kegiatan, tidak terlepas dari hambatan ataupun kendala permasalahan secara umum yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan tahun 2020, adapun kendala-kendala adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan kinerja dan penganggaran yang masih membutuhkan penyempurnaan sehingga dapat dilakukan secara baik, disebabkan beberapa faktor seperti bertambahnya pengawasan yang dilakukan seperti Audit Kinerja, Probitas Audit, Audit Ketaatan, dan anggaran peningkatan pengembangan SDM bagi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) masih belum memadai, perubahan regulasi tentang pengawasan dan pengendalian, dan lain sebagainya.

2. Masih terbatasnya jumlah aparatur dan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya Jabatan Fungsional Auditor (JFA) untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pengawasan yang lebih efektif.
3. Terdapat penyerapan anggaran pada beberapa kegiatan yang belum mencapai 100% sebagai akibat dari jenis kegiatan yang tidak memungkinkan untuk dihabiskan berdasarkan kondisi dan jenis belanja maupun harga pada saat pembelanjaan.
4. Koordinasi dan sinkronisasi Inspektorat dengan instansi-instansi yang ada baik di dalam maupun di luar daerah masih perlu dioptimalkan. Untuk dapat mengoptimalkan hal tersebut maka dibutuhkan penambahan anggaran.

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas Pelaporan merupakan unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk menyampaikan laporan pertanggungjawabannya. Entitas pelaporan dari laporan keuangan daerah dalam hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Pasangkayu.

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintah daerah sebagai pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Dalam laporan ini, entitas akuntansinya adalah Inspektorat Kabupaten Pasangkayu.

4.2. Basis Akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 disusun dan disajikan berdasarkan basis akrual, demikian juga dengan periode tahun sebelumnya. Perubahan basis akuntansi ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2014.

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis akrual, untuk pengakuan pendapatan-LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasar basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas dan sebaliknya bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual, maka LRA disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk neraca berarti bahwa asset, kewajiban dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan pemerintah daerah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Perubahan penerapan kebijakan akuntansi mengakibatkan adanya penyajian kembali untuk pos-pos pada Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Penerapan basis akrual pertama kalinya, juga menghasilkan Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1. Pendapatan

a. Pendapatan-LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah.

b. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

2. Beban

Beban adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.

3. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

4. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi/sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5. Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah.

6. Ekuitas

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih pemerintah, yaitu selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB V
PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Penjelasan Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

a. Pendapatan-LRA

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan-LRA pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2019, tidak dianggarkan atau sama dengan **Rp.0,00**.

b. Belanja

Belanja pada umumnya meliputi Belanja Operasi dan Belanja Modal. Dalam Tahun Anggaran 2020 Inspektorat Kabupaten Pasangkayu terdapat beberapa belanja yakni Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa serta Belanja Modal.

Alokasi anggaran tahun 2020 pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu sebesar **Rp. 6.065.270.791,00** yang terbagi kedalam Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Pada Belanja Tidak Langsung terdapat anggaran sebesar **Rp. 2.655.634.970,00** dan pada Belanja Langsung sebesar **Rp. 3.409.635.821,00**. Pertanggal 31 Desember 2020, anggaran tersebut telah terealisasi sebesar **Rp. 6.044.471.745,00** atau sebesar **99.66%** dari total anggaran yang ada.

Anggaran dan realisasi belanja Tahun 2020 sebagai berikut:

- Belanja Operasi

Belanja Operasi Inspektorat Kabupaten Pasangkayu meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dengan realisasi sebesar **Rp. 5.860.930.745,00**, yang dapat diurai sebagai berikut:

No.	Belanja Operasi	Anggaran 2020	Realisasi 2020	%	Realisasi 2019
1	Belanja Pegawai	2.744.964.970,00	2.736.414.695,00	99,69	2.392.107.472,00
2	Belanja Barang dan Jasa	3.135.985.821,00	3.124.516.050,00	99,63	3.547.496.700,00
Jumlah		5.880.950.791,00	5.860.930.745,00	99,66	5.939.604.172,00

- Belanja Modal

Belanja Modal pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin dengan realisasi sebesar **Rp.183.541.000,00** atau 100% dari pagu anggaran. Rincian belanja modal tersebut, sebagai berikut:

No	Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.320.000,00	183.541.000,00
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Ukur Universal	2.110.000,00	2.110.000,00

2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Reproduksi (Pengganda)	44.200.000,00	44.199.650,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor	9.238.000,00	9.229.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Meubelair	26.400.000,00	26.356.000,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Personal Komputer	39.240.000,00	38.853.100,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Peralatan Personal Komputer	49.532.000,00	49.197.250,00
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin Pengadaan Kursi Kerja Pejabat	13.600.000,00	13.596.000,00

5.2. Penjelasan Laporan Operasional

a. Pendapatan-LO

Realisasi Pos Anggaran Pendapatan-LO pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020, tidak dianggarkan atau sama dengan **Rp.0,00**.

b. Beban

Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi. Klasifikasi ekonomi pada prinsipnya mengelompokkan berdasarkan jenis beban. Klasifikasi ekonomi terdiri dari beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, bantuan keuangan, beban penyusutan aset tetap/amortisasi, beban transfer, dan beban tak terduga.

Beban pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar **Rp. 5.987.069.740,00** dan apabila dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2019 sebesar **Rp. 6.071.829.702,00** maka mengalami penurunan sebesar **Rp.84.759.962,00** atau **1,40%**, hal tersebut disebabkan karena adanya refocusing anggaran untuk keperluan penanganan dan pencegahan COVID-19.

1. Beban Pegawai

Beban Pegawai pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu pada Tahun 2020 adalah sebesar Rp. 2.736.414.695,00, apabila dibandingkan beban pegawai pada Tahun 2019 yaitu sebesar Rp. 2.392.107.472,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp.344.307.223,00 atau 14,39%, hal ini disebabkan karena adanya penambahan pegawai, Penyesuain nilai honorarium, kenaikan pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala.

2. Beban Persediaan

Beban Persediaan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 140.548.660,00. Apabila dibandingkan beban Persediaan tahun 2019 yaitu

sebesar Rp. 185.646.250,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp.(45.097.590,00) atau (24,29%) disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk keperluan penanganan dan pencegahan COVID-19.

3. Beban Jasa

Beban Jasa Inspektorat Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.368.094.554,00. Apabila dibandingkan beban jasa tahun 2019 yaitu sebesar Rp.420.214.988,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp.(52.120.434,00) atau (12,40%). Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk keperluan penanganan dan pencegahan COVID-19.

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.35.458.600,00. Apabila dibandingkan beban pemeliharaan pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.32.672.250,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp.2.786.350,00 atau 8,53%. Hal ini disebabkan karena menyesuaikan dengan kebutuhan pemeliharaan pada Inspektorat.

5. Beban Perjalanan Dinas

Beban perjalanan dinas Inspektorat Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.2.580.503.236,00. Apabila dibandingkan beban perjalanan dinas pada tahun anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 2.908.883.212,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp.(328.379.976,00) atau 11,29%. Hal ini disebabkan karena adanya pengurangan anggaran untuk keperluan penanganan dan pencegahan COVID-19.

6. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan dan amortisasi Inspektorat Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.126.049.995,00. Apabila di bandingkan beban Penyusutan dan Amortisasi pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp.117.009.699,00 maka mengalami peningkatan sebesar Rp.9.040.296,00 atau naik 7,73%.

7. Beban Lain lain

Beban Lain-lain Inspektorat Kabupaten Pasangkayu pada Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.0,00 apabila di bandingkan beban lain- lain tahun 2019 yaitu sebesar Rp.15.295.831,00 maka mengalami penurunan sebesar Rp.(15.295.831,00) atau (100%).

8. Surplus/Defisit Laporan Operasional

Dalam Laporan Operasional Tahun Anggaran 2020, berdasarkan realisasi pendapatan yang nihil atau **Rp. 0,00** dan realisasi beban **Rp.5.987.069.740,00**, maka Inspektorat Kabupaten Pasangkayu mengalami Defisit sebesar **Rp.(5.987.069.740,00)**. Hal ini dikarenakan tidak

adanya penganggaran pada pendapatan Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020.

Tabel **Penjelasan Laporan Operasional** pada Pendapatan-LO dan Beban adalah sebagai berikut:

Uraian	Saldo 2020	Saldo 2019	Kenaikan/ (Penurunan)	%
PENDAPATAN – LO	0,00	0,00	0,00	0,00
BEBAN	5.987.069.740,00	6.071.829.702,00	(84.759.962,00)	(1,40)
Beban Pegawai – LO	2.736.414.695,00	2.392.107.472,00	344.07.223,00	14,39
Beban Persediaan	140.548.660,00	185.646.250,00	(45.097.590,00)	(24,29)
Beban Jasa	368.094.554,00	420.214.988,00	(52.120.434,00)	(12,40)
Beban Pemeliharaan	35.458.600,00	32.672.250,00	2.786.350,00	8,53
Beban Perjalanan Dinas	2.580.503.236,00	2.908.883.212,00	328.379.976,00	(11,29)
Beban Penyusutan dan Amortisasi	126.049.995,00	117.009.699,00	9.040.296,00	7,73
Beban Lain-lain	0,00	15.295.831,00	(15.295.831,00)	(100)
Surplus/defisit dari Operasi	(5.987.069.740,00)	(6.071.829.702,00)	(713.255.110,00)	(13,29)

5.3. Penjelasan Laporan Perubahan Ekuitas

Komponen Perubahan Ekuitas terdiri dari Ekuitas Awal, Surplus/Defisit-LO, Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar, dan Ekuitas Akhir.

1. Ekuitas Awal

Ekuitas Awal Inspektorat Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 adalah sebesar Rp.413.904.108,00 dan pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 493.174.638,00.

2. Surplus/Defisit-LO

Surplus/Desifisit-LO Inspektorat Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 adalah sebesar Rp.(5.987.069.740,00), yang dihasilkan dari transaksi menutup akun Surplus/Defisit-LO.

3. Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan mendasar Inspektorat Kabupaten Pasangkayu merupakan koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas pada tahun 2020. Koreksi-koreksi tersebut bernilai **Rp. 415.414.871,00**.

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	2020	2019
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/ KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0.00	0.00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0.00	0.00
Koreksi ekuitas lainnya	0.00	0.00
Mutasi Aset Tetap	415.414.871.00	0,00
Koreksi terhadap Utang	0.00	0.00
Koreksi Perubahan kebijakan Akuntansi	0.00	0.00

KEWAJIBAN UNTUK DI KONSOLIDASIKAN	6.044.471.745,00	5.992.559.172,00
--	-------------------------	-------------------------

4. Ekuitas Akhir

Ekuitas Akhir pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu tahun 2020 adalah sebesar Rp.886.720.984,00, dan apabila dibandingkan dengan Ekuitas Akhir Tahun 2019 sebesar Rp. 413.904.108,00,00.

5.4. Penjelasan Pos-Pos Neraca

a. Aset

No	Uraian	2020	2019
1	Aset Lancar	325.000,00	414.000,00
2	Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
3	Aset Tetap	879.020.984,00	406.115.108,00
4	Dana Cadangan	0,00	0,00
5	Aset Lainnya	7.375.000,00	7.375.000,00
Jumlah		886.720.984,00	413.904.108,00

1. Aset Lancar

Aset Lancar pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
1	Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
2	Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
3	Kas di BLUD	0,00	0,00
4	Kas di Bendahara FKTP	0,00	0,00
5	Kas di Bendahara Bos	0,00	0,00
6	Kas Lainnya	0,00	0,00
7	Setara Kas	0,00	0,00
8	Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
9	Piutang Pendapatan	0,00	0,00
10	Piutang Lainnya	0,00	0,00
11	Penyisihan Piutang	0,00	0,00
12	Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
13	Persediaan	325.000,00	414.000,00
Jumlah		325.000,00	414.000,00

Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 0,00**.

Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2020, sebesar **Rp.325.000,00** berupa persediaan Alat Tulis

Kantor. (Stok Opname Persediaan terlampir)

2. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu, adalah sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
1	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00	0.00
2	Investasi Jangka Panjang Permanen	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

3. Aset Tetap

Aset Tetap pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp.879.020.984,00 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
1	Tanah	0,00	0,00
2	Peralatan dan Mesin	1.258.613.529,00	1.071.438.241,00
3	Gedung dan Bangunan	923.620.000,00	0,00
4	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
5	Aset Tetap lainnya	0,00	0,00
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0,00	0,00
7	Akumulasi Penyusutan	(1.303.212.545,00)	(665.323.133,00)
Jumlah		879.20.984,00	406.115.108,00

4. Dana Cadangan

Saldo Dana Cadangan pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp. 0.00.

No	Uraian	2020	2019
1	Dana Cadangan	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

5. Aset Lainnya

Aset Lainnya pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 sebesar Rp.0,00 dengan uraian sebagai berikut:

No	Uraian	2020	2019
1	Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
2	Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
3	Aset tidak Berwujud	0,00	0,00
4	Aset lain-lain	7.375.000.00	7.375.000.00

Jumlah	7.375.000.00	7.375.000.00
---------------	---------------------	---------------------

6. Kewajiban

No	Uraian	2020	2019
1	Kewajiban Jangka Pendek	0.00	0.00
2	Kewajiban Jangka Panjang	0.00	0.00
Jumlah		0.00	0.00

Sampai dengan 31 Desember 2020 Inspektorat Kabupaten Pasangkayu tidak mempunyai kewajiban.

c. Ekuitas

No	Uraian	2020	2019
1	Ekuitas	886.720.984,00	413.904.108,00
Jumlah		886.720.984,00	413.904.108,00

Ekuitas pada Inspektorat Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 yang terdiri dari Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

BAB IV PENUTUP

Pada akhir Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 ini, ada beberapa hal penting yang perlu disampaikan berkenaan dengan Laporan Keuangan SKPD. Hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun Anggaran 2020 per 31 Desember 2020, telah di susun dengan berdasar kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Realisasi Anggaran Tahun 2020 pada anggaran Belanja Langsung Inspektorat Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020 dengan penyerapan anggaran sebesar **99.66%** dan telah sesuai dengan target yang diharapkan.
3. Kas pada Saldo Kas Bendahara Pengeluaran Inspektorat Kabupaten Pasangkayu per 31 Desember 2020, adalah Rp. 00,00.
4. Neraca SKPD Inspektorat Kabupaten Pasangkayu Tahun 2020, menggambarkan posisi keuangan yakni posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2020, pada Pos Aset Tetap telah dilakukan perhitungan nilai penyusutan Aset yang ada.
5. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) ini di susun berdasarkan penggunaan anggaran Inspektorat Kabupaten Pasangkayu untuk Tahun Anggaran 2020.

Demikian Laporan Keuangan Akhir Tahun Inspektorat Kabupaten Pasangkayu yang di buat dan dilaporkan per 31 Desember 2020. Laporan ini disampaikan sebagai laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2020 yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pasangkayu.

Diharapkan, Laporan Keuangan Akhir Tahun ini dapat menjadi bahan acuan semua pihak dalam penilaian kinerja instansi pemerintah, khususnya Inspektorat Kabupaten Pasangkayu yang merupakan wujud dari transparansi dan akuntable sesuai dengan yang diamanatkan dalam tata kelola Good Goovernance.

Sekian dan terima kasih.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

NERACA
INSPEKTORAT
Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	325.000,00	414.000,00
JUMLAH ASET LANCAR	325.000,00	414.000,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Investasi Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	1.258.613.529,00	1.071.438.241,00
Gedung dan Bangunan	923.620.000,00	0,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	0,00	0,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	-1.303.212.545,00	-665.323.133,00
JUMLAH ASET TETAP	879.020.984,00	406.115.108,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	7.375.000,00	7.375.000,00
JUMLAH ASET LAINNYA	7.375.000,00	7.375.000,00
JUMLAH ASET	886.720.984,00	413.904.108,00

NERACA
INSPEKTORAT
Per 31 Desember 2020 dan 2019

URAIAN	2020	2019
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	0,00	0,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
R/K Pusat	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS		
EKUITAS	886.720.984,00	413.904.108,00
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	886.720.984,00	413.904.108,00

Pasangkayu, 31 Januari 2021
Pengguna Anggaran

RAHMAT, S.Sos., M.Si
NIP. 19750429 200312 1 006